

KUMPULAN ANALISIS

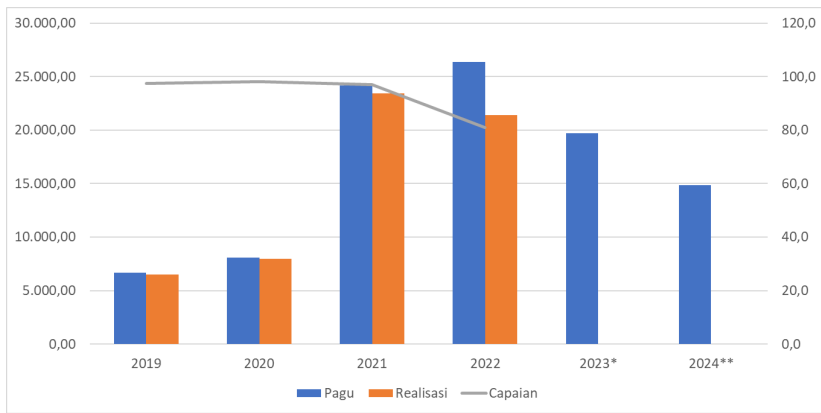
SIKLUS PEMBAHASAN
NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2024

MITRA KOMISI I



CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

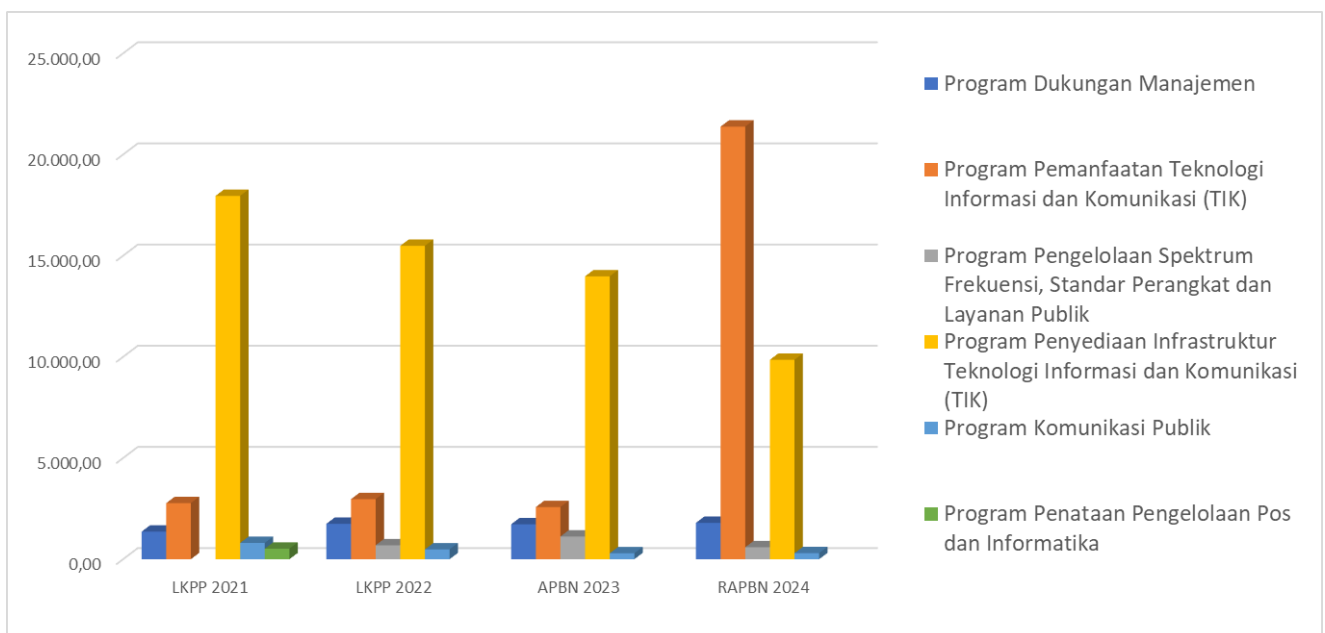
Gambar 1. Perkembangan Anggaran Kemkominfo Tahun 2019-2024 (Rp Miliar)



Sumber: Lakin Kemkominfo dan NK RAPBN 2024, data diolah (2023))* APBN 2023,)** RAPBN 2024

- Sepanjang tahun 2019 hingga 2022, pagu anggaran Kemkominfo mengalami peningkatan. Ditahun 2021 peningkatan tersebut hingga mencapai 198,2 persen. Kemudian sejak tahun 2023 hingga 2024 alokasi anggaran mulai mengalami penurunan.
- **Capaian anggaran Kemkominfo cenderung mengalami penurunan** disepanjang tahun tersebut, terlebih untuk tahun 2022 yang hanya sebesar 81,1 persen

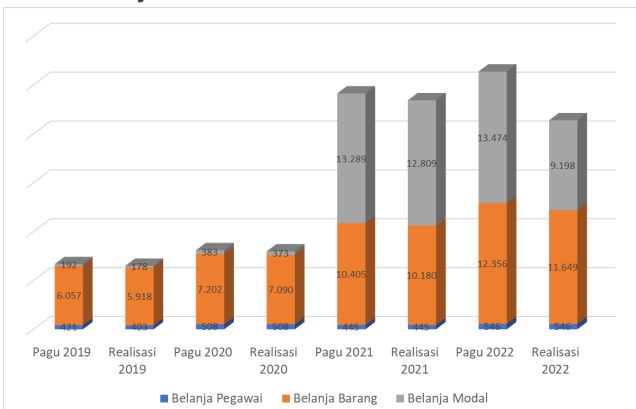
Gambar 2. Perkembangan Anggaran Per Program Kemkominfo Tahun 2021-2024 (Rp Miliar)



Sumber: NK RAPBN 2024, data diolah (2023)

- Alokasi anggaran untuk program Penyediaan Infrastruktur TIK mendominasi sejak tahun 2021 hingga 2023, namun **alokasi tersebut cenderung mengalami penurunan sejak periode tahun tersebut hingga di tahun 2024 kedepan.**
- Tahun 2024 program pemanfaatan TIK menjadi dominan diantara program lainnya, naik Rp18.802,8 miliar atau 729,3 persen, sementara program komunikasi publik menjadi program yang memiliki alokasi anggaran terkecil

Gambar 3. Perkembangan Anggaran Per Jenis Belanja Kemkominfo Periode 2019-2022



Sumber: Lakin Kemkominfo, data diolah (2023)

- Berdasarkan alokasi anggaran perjenis belanja, proporsi belanja barang mendominasi sejak tahun 2019 hingga 2021. **Ditahun 2022 terjadi pergeseran proporsi dimana belanja modal menjadi dominan diantara jenis belanja lainnya.** Hal ini menjadi sebuah perbaikan mengingat kebermanfaatan jangka panjang dan berdampak pada pelayanan publik. Namun perbaikan tersebut tidak diiringi dengan capaian realisasi anggaran, yang hanya terealisasi sebesar 68,2 persen.
- Jika dilihat berdasarkan capaian anggaran perjenis belanja, sayangnya **anggaran yang dialokasikan pada belanja modal maupun belanja barang sepanjang periode tersebut tidak pernah mencapai target.**
- Rata-rata capaian belanja barang tahun 2019-2022 sebesar 97,06 persen, sementara rata-rata capaian belanja modal pada periode yang sama hanya sebesar 88,68 persen

Komisi I DPR RI perlu mendorong Kemkominfo untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penyerapan anggaran dan kinerja organisasi dalam rangka terwujudnya akselerasi transformasi digital serta meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik

Gambar 3. Perkembangan Kinerja Kemkominfo Periode 2020-2022

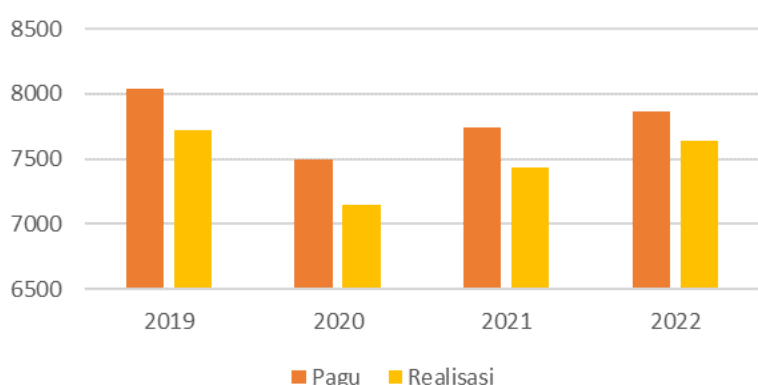
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau	Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G	1.606	1.682	5.623	3.370	11.661	8.196
		Persentase (%) Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk Layanan Broadband Sebesar 90 MHz	100%	100%	100%	90%	100%	100%
2	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital	60%	67,91%	70%	70,67%	75%	76,44%
3	Meningkatnya Pemahaman, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK	205.000	213.143	12.448.750	12.330.670	5.500.000	5.879.720
		Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital	45.000	58.116	105.772	133.604	202.675	245.224
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	70%	75,50%	72%	77,70%	73%	79,45%
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	76,5	76,28	78	78,18	80	79,01

Sumber: Lakin Kemkominfo, data diolah (2023)

- Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kemkominfo, pada tahun 2022, dari 7 indikator kinerja yang dilaporkan ,
- sebanyak **4 indikator kinerja memiliki capaian kinerja melebihi target, 1 indikator kinerja sesuai target, dan 2 indikator kinerja tidak mencapai target.**
- 2 indikator yang tidak mencapai target ditahun 2022 yakni indikator Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G yang hanya mencapai 70,29 persen dari target dan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 98,76 persen.
- **Ketidaktercapaiannya indikator Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G terjadi selama 2 tahun berturut turut,** yakni sejak tahun 2021 yang hanya sebesar 59,93 persen.

POTRET ANGGARAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Gambar 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenlu RI Periode 2019-2022 (Rp Miliar)

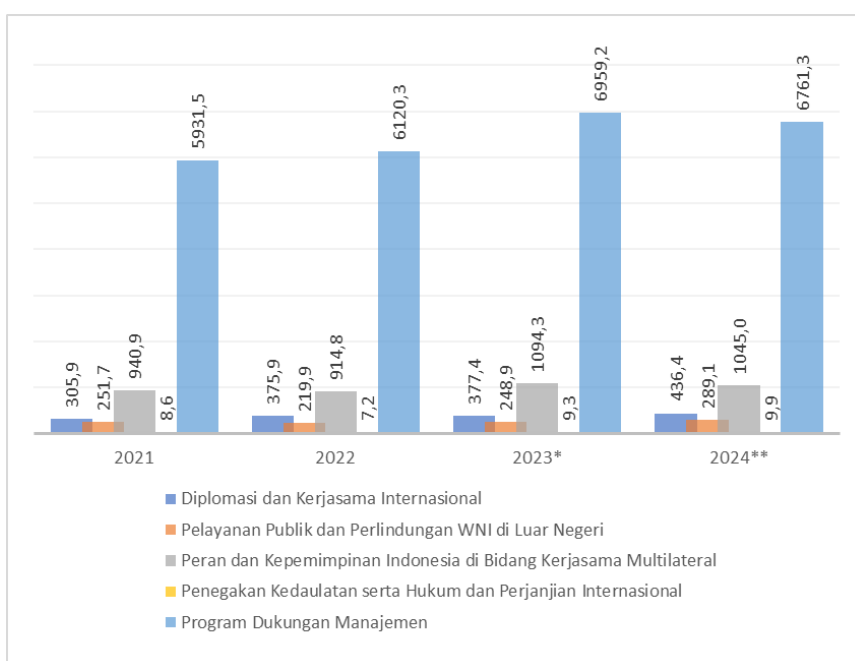


Sumber: Laporan Kinerja Kemenlu 2019-2022, data diolah (2023)

- Pagu Anggaran Kemenlu selama periode 2019-2022 menunjukkan fluktuatif. Meskipun demikian, serapan anggaran mengalami peningkatan sejak 2019.
- Rata-rata daya serap anggaran sebesar 96,16 persen pertahun sejak 2019 atau sebesar Rp7,63 triliun.
- Realisasi anggaran Kemenlu rata-rata tumbuh minus 0,34 persen per tahun. Hal tersebut terjadi karena daya serap anggaran pada 2020 relatif rendah karena terdampak Covid-19

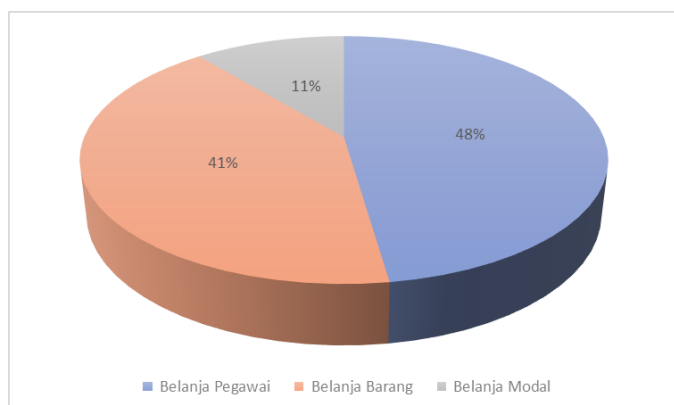
- Alokasi anggaran Kemenlu masih dominan untuk program belanja rutin (dukungan manajemen). Program tersebut mencapai 80 persen dari total alokasi anggaran Kemenlu.
- Dari enam jenis program Kemenlu, program penegakan kedaulatan serta hukum internasional mendapat alokasi anggaran terkecil atau rata-rata hanya sebesar Rp8,8 miliar atau hanya 0,11 persen
- Alokasi anggaran untuk program pelayanan publik dan perlindungan TKI relative kecil atau rata-rata Rp252,4 miliar (hanya 3,12 persen).
- Alokasi anggaran untuk program diplomasi dan kerjasama internasional juga relatif kecil hanya 4,63 persen atau rata-rata Rp373,9 miliar.

Gambar 2. Perkembangan Anggaran Per Program Kemenlu RI Periode 2021-2024 (Triliun Rupiah)



Sumber: LKPP, Laporan Kinerja Kemenlu RI, NK APBN 2023 dan NK RAPBN 2024,)* outlook APBN 2023,)** RAPBN 2024, diolah

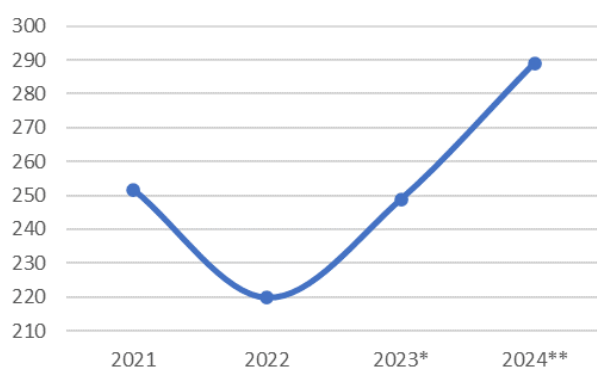
Gambar 3. Persentase Rata-Rata Per Jenis Anggaran Belanja Kemenlu Periode 2019-2022



Sumber: Laporan Kinerja Kemenlu, data diolah (2023)

- Jika dilihat per jenis belanja, alokasi anggaran belanja pegawai masih mendominasi dalam anggaran Kemenlu sejak 2019. Rata-rata alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai 48 persen dari total belanja Kemenlu atau sebesar Rp3,224 triliun.
- Sedangkan alokasi anggaran untuk belanja barang dan modal rata-rata masing-masing sebesar Rp2,78 triliun dan Rp745,1 miliar atau (41 persen dan 11 persen) selama 2019-2022.
- Alokasi anggaran untuk belanja pegawai mengalami pertumbuhan positif sejak 2019 atau meningkat sebesar 2,6 persen per tahun. Sedangkan alokasi anggaran untuk belanja barang dan modal justru tumbuh rata-rata masing-masing minus 1,8 persen dan minus 5,4 persen per tahun.
- Hal tersebut menunjukkan bahwa Kemenlu belum mampu meningkatkan proporsi belanja modal maupun barang dalam empat tahun terakhir,

Gambar 4. Realisasi Anggaran Pelayanan Publik dan Perlindungan WNI Periode 2021-2024



Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2024, data diolah (2023))* outlook APBN 2023,)** RAPBN 2024

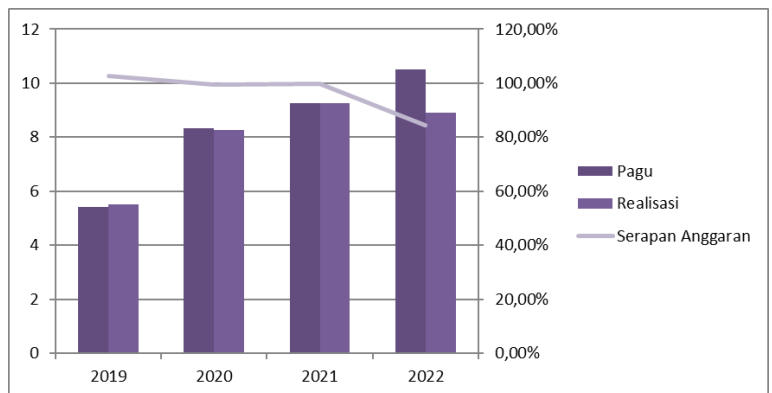
- Dukungan anggaran untuk program pelayanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri meskipun meningkat, namun relatif masih kecil. Secara rata-rata, alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri tumbuh positif sebesar 3,12 persen per tahun.
- Namun, bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani oleh Kemlu dalam rangka perlindungan WNI mencapai 35.149 kasus, maka hanya Rp7,2 juta untuk penanganan per satu kasus WNI.
- Pertanyaan kemudian, apakah jumlah anggaran tersebut cukup untuk pelayanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri? Data Kemenlu menunjukkan bahwa ada sekitar 35.149 WNI di luar negeri. Masih terdapat sekitar 4.255 kasus WNI yang belum tertangani pada 2022. Hal tersebut mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang relatif kecil dapat berpengaruh pada optimalisasi penanganan kasus WNI di luar negeri.

Komisi I DPR RI perlu mendorong alokasi anggaran yang relatif cukup memadai agar pelayanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri dapat dioptimalkan pada tahun mendatang.

PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BADAN INTELIJEN NEGARA 2019-2024

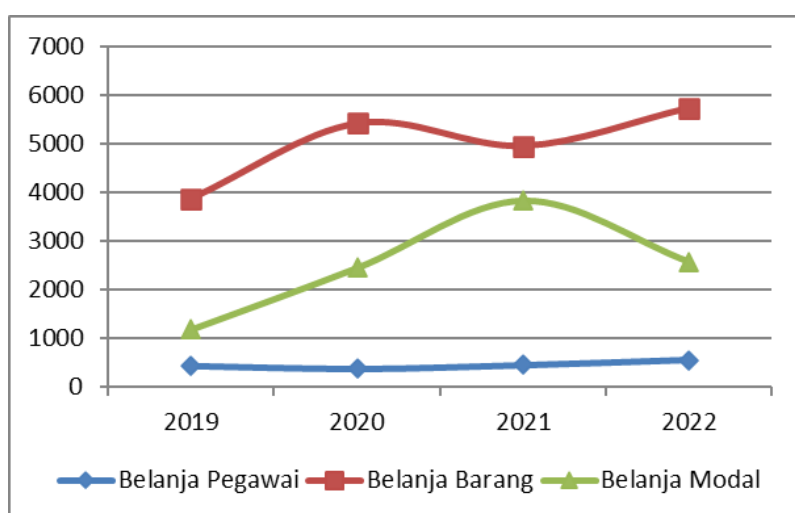
- Pagu Anggaran Badan Intelijen Negara (BIN) mengalami perkembangan yang positif selama periode 2019-2022. Rata-rata alokasi pagu anggaran belanja BIN sebesar Rp8,4 triliun dengan pertumbuhan anggaran sebesar 24,81 persen per tahun atau naik dari Rp5,4 triliun pada 2019 menjadi Rp10,5 triliun pada 2022.
- Realisasi anggaran BIN menunjukkan peningkatan sejak 2019. Namun, pada 2022 justru mengalami kontraksi.
- Rata-rata realisasi anggaran belanja BIN sebesar Rp7,9 triliun atau tumbuh 17,4 persen per tahun, meningkat dari Rp5,5 triliun pada 2019 menjadi Rp8,9 triliun pada 2022.
- Persentase kenaikan anggaran belanja BIN tertinggi pada 2020 sebesar 50,36 persen (menjadi Rp8,27 triliun).
- Kemudian pada 2021 mulai melambat atau hanya tumbuh 11,91 persen menjadi Rp9,25 triliun). Hingga 2022, realisasi anggaran belanja BIN tumbuh minus 3,84 persen menjadi Rp8,9 triliun).
- Dari sisi daya serap, anggaran belanja BIN justru menunjukkan **penurunan yang relatif cukup tajam dari 102,68 persen pada 2019 menjadi 84,34 persen pada 2022. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khususnya dalam pengelolaan anggaran.** Meskipun demikian, secara rata-rata serapan anggaran belanja BIN sebesar 96,56 persen selama 2019-2022.

Gambar 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran BIN Periode 2019-2022 (Triliun Rupiah)



Sumber: LKPP 2019-2022, data diolah (2023)

Gambar 2. Perkembangan Anggaran Per Jenis Belanja BIN Periode 2019-2022 (Miliar Rupiah)



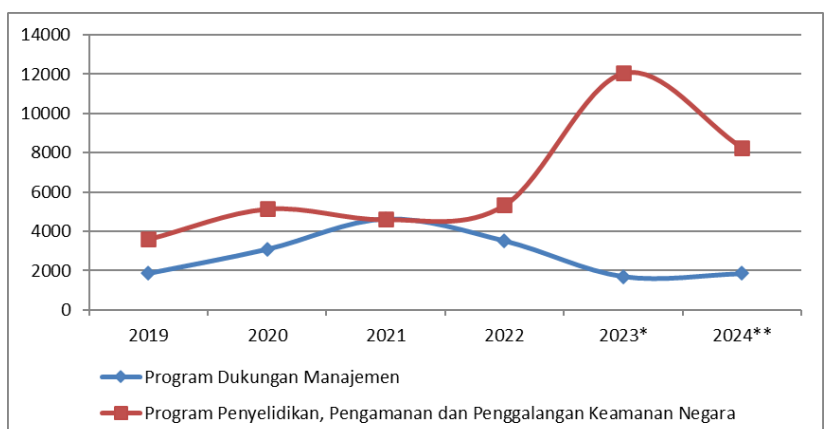
Sumber: LKPP 2019-2022, data diolah (2023)

- Belanja pegawai relatif lebih rendah (5,68 persen) dibandingkan dengan belanja barang (62,74 persen) dan belanja modal (31,58 persen) selama periode 2019-2022.

- Jika dilihat per jenis belanja, **anggaran belanja BIN terbesar adalah belanja modal**, kemudian diikuti oleh belanja barang dan belanja pegawai
- Belanja pegawai relatif lebih rendah (5,68 persen) dibandingkan dengan belanja barang (62,74 persen) dan belanja modal (31,58 persen) selama periode 2019-2022.
- Jika dilihat per jenis belanja, anggaran belanja BIN terbesar adalah belanja modal, kemudian diikuti oleh belanja barang dan belanja pegawai.

- Dilihat dari sisi program, anggaran belanja BIN terfokus pada program penyelidikan, pengamanan dan penggalan keamanan negara (P3KN) (rata-rata 70,03 persen) dibandingkan pada program dukungan manajemen (rata-rata 29,97 persen) selama periode 2019-2024.
- Anggaran belanja program dukungan manajemen justru tumbuh kontraktif sebesar minus 0,16 persen per tahun. Sedangkan program P3KN tumbuh 18,03 persen per tahun.

Gambar 3. Realisasi dan Outlook Anggaran Program Belanja BIN Periode 2019-2024



Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2024)* outlook APBN 2023,)** RAPBN 2024, data diolah (2023)

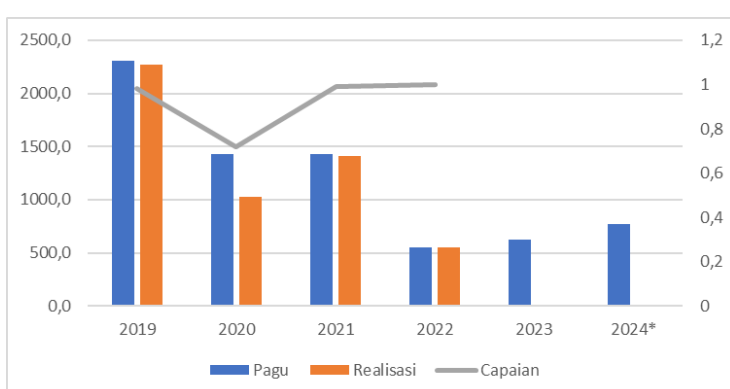
- Namun demikian, anggaran belanja pada dukungan manajemen (sebesar Rp4,646 triliun) pernah melampaui anggaran belanja program P3KN (sebesar Rp4,609 triliun) pada 2021. Hal tersebut menjadikan anggaran dukungan manajemen mendapat alokasi tertinggi selama periode 2019-2022.
- Sedangkan lonjakan anggaran belanja P3KN tertinggi terjadi pada 2023 (mencapai Rp12,05 triliun). Hal tersebut terjadi karena sudah memasuki momentum prosesi tahapan pemilihan umum yang memerlukan antisipasi keamanan negara. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah **sejauh mana kebutuhan anggaran BIN pada 2023 bila mengalami kenaikan cukup tajam mencapai 125 persen? meskipun kemudian kembali diproyeksikan turun menjadi Rp8,3 triliun pada 2024. Padahal masih menyisakan kontestasi politik seperti Pilkada pada akhir 2024.**

Komisi I DPR dapat meminta penjelasan dari Kepala BIN terkait rasionalisasi anggaran 2023 yang mengalami kenaikan cukup tajam. Seharusnya, alokasi anggaran pada 2024 minimal sama dengan 2023 karena masih menyisakan tahapan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Namun, pemerintah justru menurunkan porsi belanja P3KN sebesar minus 31 persen pada 2024.

SEKILAS ANGGARAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

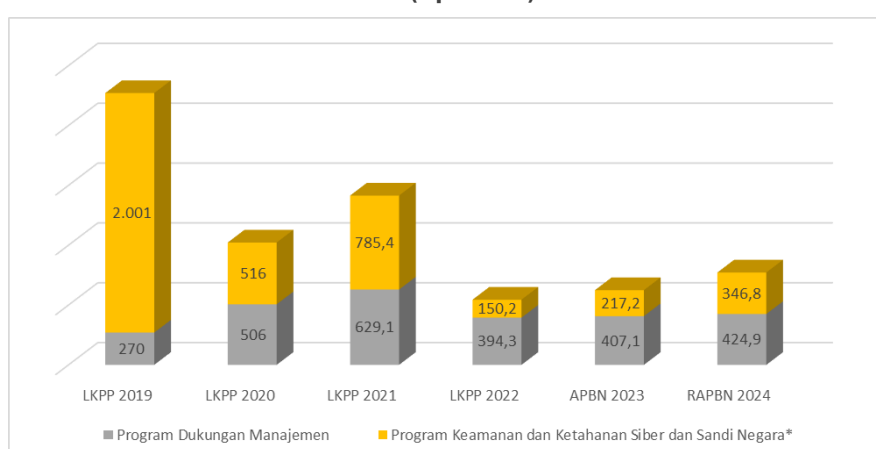
- Dalam kurun waktu 2019 hingga 2022, pagu anggaran BSSN mengalami penurunan. Sementara alokasi tahun 2023 dan tahun 2024 kedepan mulai mengalami peningkatan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 14,2 persen dan 23,6 persen.
- Serapan anggaran sepanjang tahun 2019 hingga 2022 berfluktuatif. Terendah ditahun 2020, dampak dari penyesuaian kondisi covid-19.
- Pada tahun 2022, serapan anggaran terealisasi sebesar Rp546,2 miliar atau mencapai 99,9 persen

Gambar 1. Perkembangan Anggaran BSSN Tahun 2019-2024 (Rp Miliar)



Sumber: Lakin BSSN 2022 dan NK RAPBN 2024, data diolah (2023)

Gambar 2. Perkembangan Anggaran Per Program BSSN Tahun 2019-2024 (Rp Miliar)



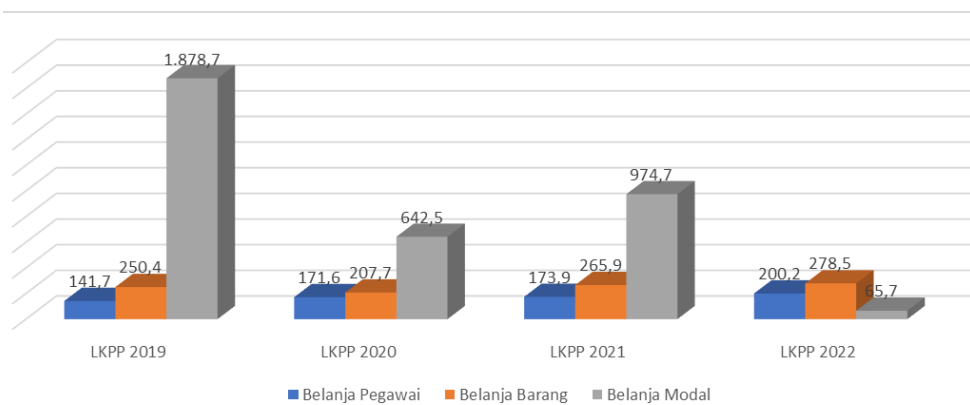
Sumber: APBN 2023 dan NK RAPBN 2024, data diolah (2023)

- Berdasarkan perkembangan anggaran per program, proporsi anggaran program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara tahun 2019 sampai dengan 2021 masih mendominasi. Namun sayangnya mulai tahun 2022 hingga rancangan APBN tahun 2024 kedepan mulai mengalami perubahan, dimana program dukungan manajemen memiliki komposisi terbesar.

- Komposisi program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara tahun 2023 dan 2024 hanya sebesar 34,7 persen dan 44,9 persen
- Dengan gambaran proporsi tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran program pendukung menjadi lebih prioritas dibandingkan dengan program utamanya. Padahal anggaran program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sangat penting dalam penanganan siber mengingat potensi serangan siber yang kian meningkat dan marak terjadi.

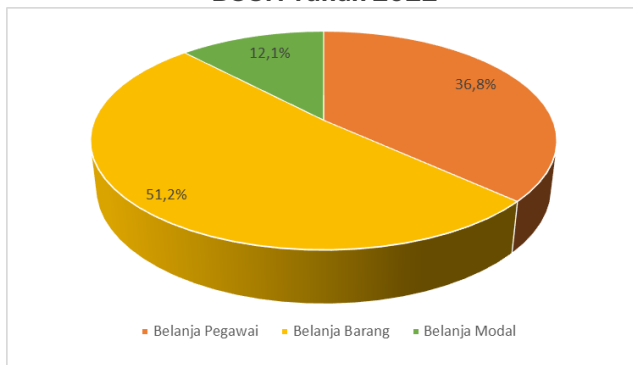
- Proporsi anggaran BSSN per jenis belanja, sejak tahun 2019 hingga 2021 didominasi oleh belanja modal, dengan pertumbuhan yang fluktuatif.
- Namun ditahun 2022 terjadi pergeseran yang sangat signifikan, dimana belanja modal tidak lagi menjadi prioritas dibandingkan 2 jenis belanja lainnya. alokasi besarnya pun menurun tajam dibandingkan tahun sebelumnya (2021), yakni menjadi Rp65,7 miliar atau turun sebesar 93,3 persen.
- Proporsi belanja modal ditahun 2022 hanya sebesar 12,1 persen. Sementara proporsi belanja barang dan pegawai masing-masing sebesar 51,2 persen dan 36,8 persen. Belanja barang mendominasi diantara belanja lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa belanja yang dilakukan oleh BSSN sebagian besar berupa belanja konsumsi yang tidak menyebabkan adanya penambahan asset BSSN dan manfaat dari belanja tersebut hanya dapat dirasakan kurang dari 1 tahun.

Gambar 3. Perkembangan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2019-2022



Sumber: LKPP 2019-2022, data diolah (2023)

Gambar 3. Proporsi Anggaran Perjenis Belanja BSSN Tahun 2022



Sumber: LKPP 2022, data diolah (2023)

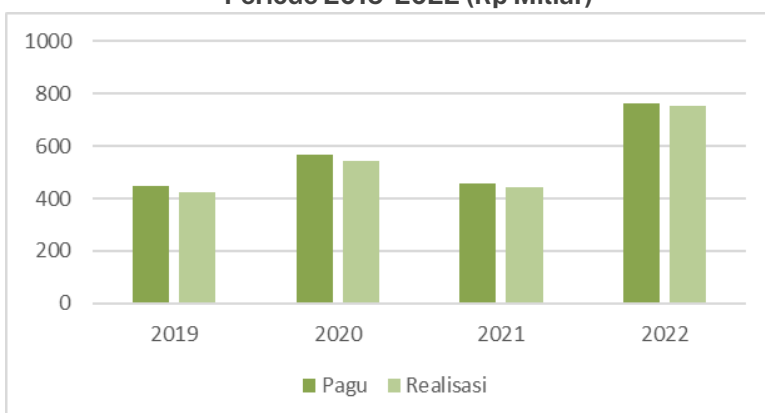
- Berdasarkan laporan kinerja BSSN tahun 2022, dari 13 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 10 indikator kinerja memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja sesuai target, dan 2 indikator kinerja tidak mencapai target, yakni Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan masing-masing capaian sebesar 95,36 persen dan 82 persen.
- Salah satu sasaran kinerja BSSN yakni Meningkatkan Keamanan Siber Indonesia dengan indikator kinerja Global Cybersecurity Index. Meskipun indikator tersebut telah mencapai target sebesar 109 persen dan menempatkan Indonesia pada peringkat 24 dari 194 negara, namun posisi masih jauh berada dibawah Singapura (Peringkat 4) dan Malaysia (Peringkat 5).

Komisi I DPR RI perlu mendorong peningkatan dan memprioritaskan anggaran program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara. Keterbatasan anggaran tersebut akan berpotensi menjadikan penanganan keamanan siber nasional tidak akan optimal. Keterbatasan menyebabkan prioritas nasional dan prioritas lembaga BSSN dan keamanan siber belum dapat maksimal, sehingga berpotensi terhadap keamanan siber Indonesia.

EVALUASI KINERJA ANGGARAN BADAN KEAMANAN LAUT

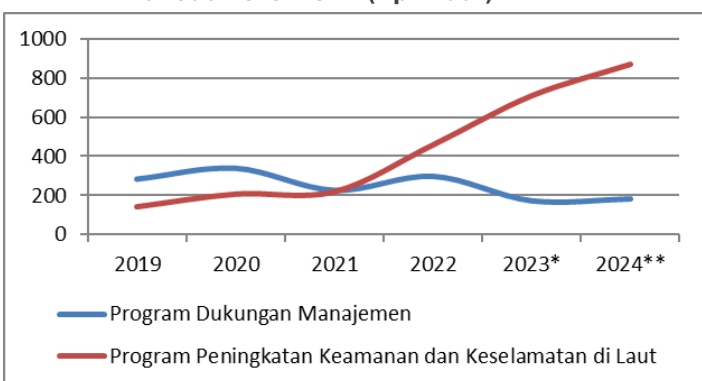
- Pagu Anggaran Bakamla mengalami perkembangan fluktuatif selama periode 2019-2022. Meskipun demikian, serapan anggaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
- Rata-rata daya serap anggaran sebesar 96,81 persen pertahun sejak 2019 atau sebesar Rp542,1 miliar.
- Realisasi anggaran Bakamla rata-rata tumbuh positif 21,22 persen pertahun.
- Hal tersebut terjadi karena **daya serap anggaran terus meningkat dari 94,79 persen pada 2019 menjadi 98,93 persen pada 2022.**

Gambar 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Periode 2019-2022 (Rp Miliar)



Sumber: Laporan Kinerja Bakamla 2019-2022, data diolah (2023)

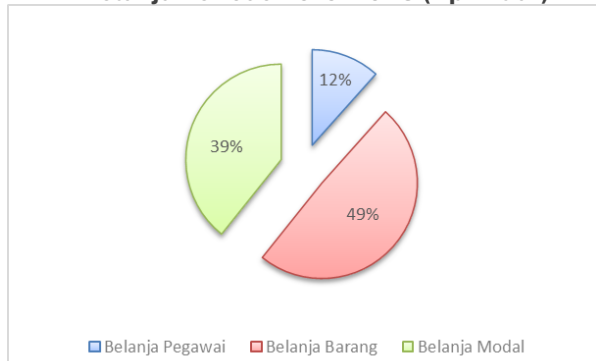
Gambar 2. Perkembangan Anggaran Per Program Periode 2019-2024 (Rp Miliar)



Sumber: LKPP, Lakin Bakamla RI, NK APBN 2023 dan NK RAPBN 2024, *)* outlook APBN 2023, **)** RAPBN 2024, data diolah (2023)

- **Anggaran Bakamla mengalami shifting yang cukup signifikan pada 2022.** Alokasi anggaran Bakamla selama 2019-2021 masih dominan pada program dukungan manajemen.
- Rata-rata anggaran pada dukungan manajemen sebesar Rp284,4 miliar atau 60,39 persen. Sedangkan untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut hanya rata-rata sebesar Rp186,5 miliar atau 39,61 persen.
- Namun, sejak 2022 hingga proyeksi 2024, dukungan anggaran untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut meningkat tajam menjadi rata-rata Rp677,5 miliar atau naik menjadi 75,53 persen.
- Sedangkan anggaran untuk program dukungan manajemen mengalami kontraksi rata-rata Rp219,5 miliar atau hanya 24,47 persen.

Gambar 3. Persentase Rata-Rata Anggaran Per Jenis Belanja Periode 2019-2023 (Rp Miliar)

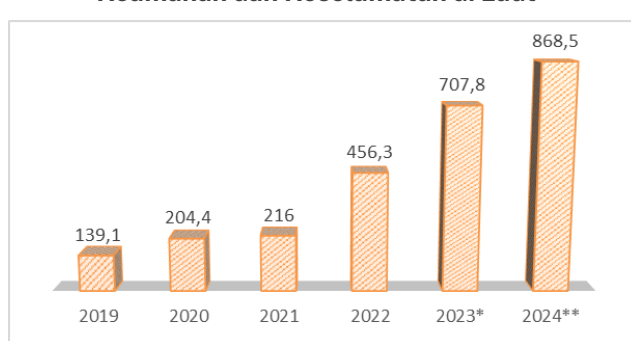


Sumber: Laporan Kinerja Bakamla, data diolah (2023)

- Jika dilihat per jenis belanja, anggaran belanja pegawai relatif lebih rendah dibandingkan dengan belanja barang dan jasa selama periode 2019-2023.
- Rata-rata anggaran belanja pegawai hanya sebesar Rp70,9 miliar atau 11,62 persen. Rata-rata anggaran belanja barang mencapai Rp299,8 miliar atau 49,13 persen. Kemudian, anggaran belanja modal rata-rata 39,25 persen atau sebesar Rp239,5 miliar.
- Namun demikian, Namun demikian, tidak sama halnya dengan belanja pegawai dan belanja barang. Pertumbuhan anggaran belanja pegawai relatif masih tinggi (18,78 persen) dibandingkan dengan anggaran belanja barang (10,45 persen), hal ini mengartikan bahwa **kenaikan belanja pegawai setiap tahun lebih cepat dibandingkan dengan belanja barang.**
- Tidak sama halnya dengan belanja modal. Pertumbuhan anggaran belanja modal meningkat relatif lebih cepat dengan rata-rata tumbuh per tahun sebesar 30,05 persen, hal ini menunjukkan bahwa **terjadi peningkatan belanja modal secara relatif dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang.**

Komisi I DPR RI perlu mendorong alokasi anggaran yang relatif cukup memadai dan efektif agar alokasi anggaran untuk peningkatan jumlah unsur dan kuantitas SDM Bakamla dapat dipenuhi sehingga mampu menurunkan rasio tersebut di atas secara bertahap.

Gambar 4. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut



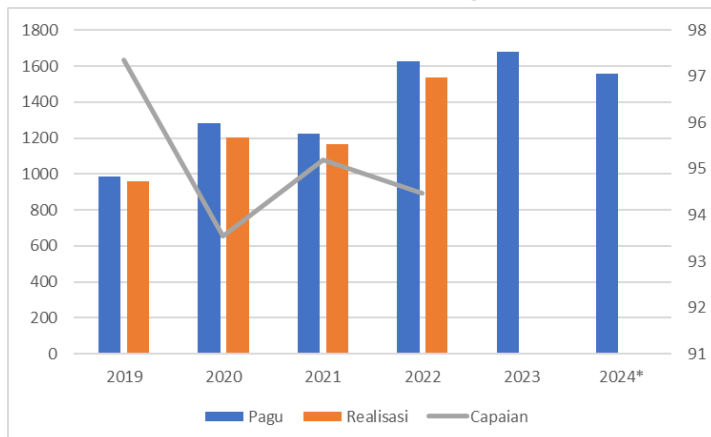
Sumber: Laporan Kinerja Bakamla 2019-2022 dan NK RAPBN 2024, data diolah (2023)

- Dukungan anggaran untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut meningkat cukup tajam sejak 2022. Hal ini membuktikan bahwa Bakamla sudah mulai memahami urgensi pengamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia dari 12 nautical mile hingga 350 nautical mile.
- Secara rata-rata, anggaran program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut tumbuh 44 persen per tahun selama 2019-2024. Namun, **peningkatan alokasi anggaran untuk program tersebut belum sepenuhnya menjawab rasio jumlah unsur alutsiskamla RI dan SDM personil Bakamla dibandingkan dengan negara tetangga seperti China, Singapura, Malaysia dan Vietnam.**
- Unsur alutsiskamla periode 200-2023 belum menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Justru sebaliknya mengalami kurangan satu unsur (rusaknya satu unit kapal RHIB) dari sebelumnya 32 unsur.
- Jumlah SDM Bakamla pada periode 2020 hingga semester I 2023, jumlahnya meningkat menjadi 1.201 orang personil aktif. Jumlah tersebut naik sebanyak 323 orang personil atau bertambah 80 personil setiap tahun. Dibandingkan rasio jumlah personil Bakamla negara lain dengan luas wilayah lautnya, rasio Indonesia menjadi 1:2.497 Km². China memiliki personil 16.296 dengan luas laut 3,69 juta Km² (1:266 Km²), Singapura (1:0,01 Km²), Malaysia (1:0,59 Km²), dan Vietnam (1:2,64 Km²).

CAPAIAN ANGGARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

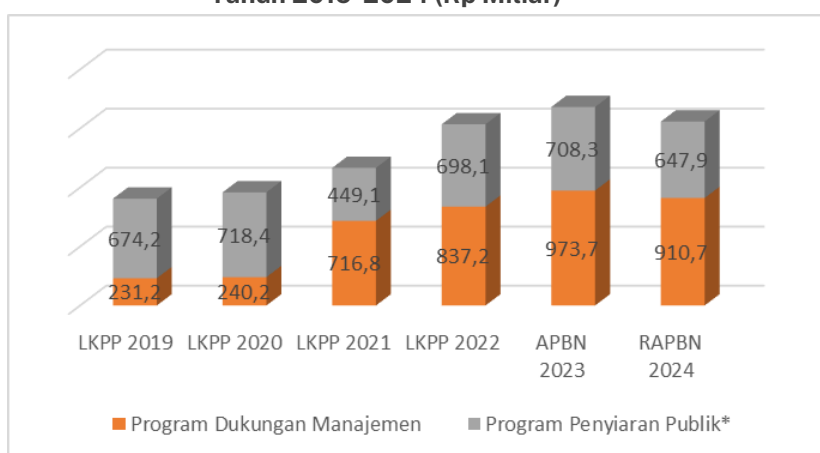
- Dalam periode tahun 2019-2024, pagu anggaran TVRI berfluktuatif, Pada tahun 2020, pagu anggaran meningkat dan mengalami penurunan di tahun 2021. Kemudian mengalami peningkatan signifikan di tahun 2022 hingga mencapai Rp1625,0 atau naik sebesar 32,6 persen, namun kembali menurun pada rancangan APBN tahun 2024 mendatang.
- **Realisasi anggaran sepanjang tahun tersebut (2019-2022) tidak pernah mencapai target.** Rata-rata serapan hanya mencapai 95,1 persen

Gambar 1. Perkembangan Anggaran TVRI Tahun 2019-2024 (Rp Miliar)



Sumber: Lapkeu TVRI 2019-2022 dan NK RAPBN 2024, data diolah (2023)

Gambar 2. Perkembangan Anggaran Per Program Tahun 2019-2024 (Rp Miliar)



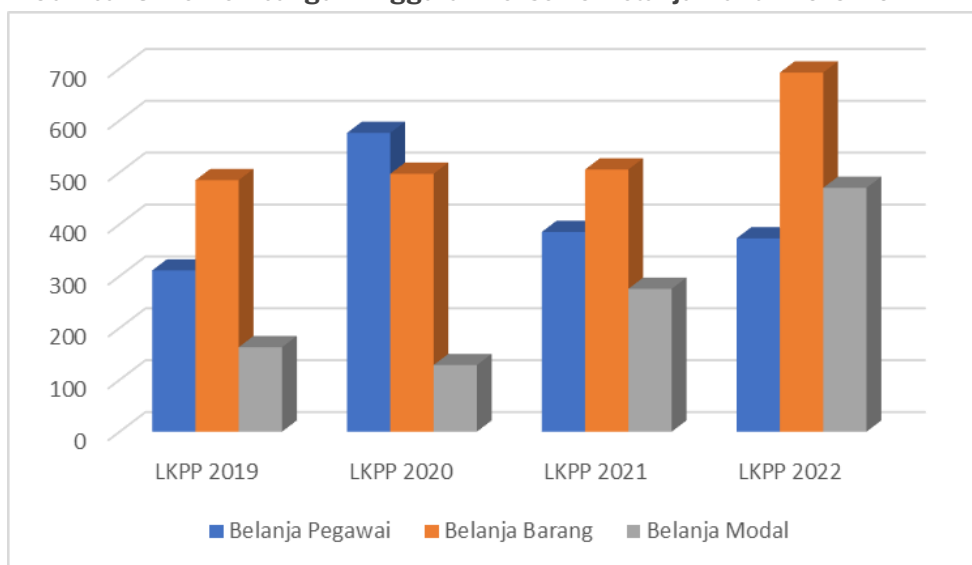
Sumber: APBN 2023 dan NK RAPBN 2024, data diolah (2023)

- Mengacu data APBN 2023 dan NK RAPBN 2024. Selama tahun 2019 hingga 2020, komposisi anggaran per program di dominasi oleh program penyiaran publik. Namun sejak 2021 hingga tahun 2024 kedepan, terjadi perubahan yang signifikan dimana program dukungan manajemen mendominasi jika dibandingkan dengan program utama yakni penyiaran publik.

- **Anggaran program penyiaran publik tidak lagi menjadi prioritas selama 3 tahun (2021-2023) terakhir, dimana rata-rata proporsi anggaran tersebut hanya sebesar 42 persen. Padahal anggaran tersebut menjadi penting bagi TVRI dalam meningkatkan kualitas, keterjangkauan dan ketersediaan penyiaran publik.**

- Berdasarkan anggaran perjenis belanja, secara rata-rata belanja barang mendominasi selama 4 tahun terakhir sejak 2019 hingga 2022.
- Meskipun alokasi anggaran belanja modal mulai meningkat sejak tahun 2021. Namun Pada periode tersebut, menunjukkan

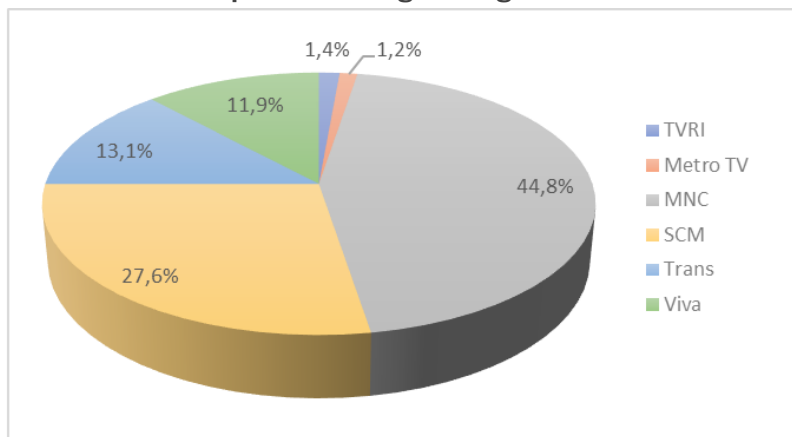
Gambar 3. Perkembangan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2019-2022



Sumber: LKPP 2019-2022, data diolah (2023)

- **rata-rata proporsi belanja modal masih kecil (21,32 persen) jika dibandingkan dengan belanja barang yang mencapai 44,84 persen dan belanja pegawai (33,83 persen). Padahal belanja modal menjadi penting untuk pembiayaan program LPP TVRI dalam memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun periode.**

Gambar 4. Grup Televisi dengan Pangsa Pemirsa Terbesar



Sumber: Nielsen, 2021

TVRI dalam menjangkau ketertarikan pemirsa di Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta lainnya

Salah satu indikator kinerja TVRI yakni dilihat dari besarnya audience sharing/ pangsa pemirsa. Laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja LPP TVRI 2021, **realisasi audience sharing hanya mencapai 1,28 persen atau 64 persen dari target.** Sementara data Nielsen (2021) menunjukkan kepemirsaaan TVRI hanya mencapai 1,4%. Dapat dikatakan **posisi dan kontribusi**

Komisi I DPR RI perlu mendorong LPP TVRI dalam mengoptimalkan dan memprioritaskan anggaran khususnya untuk program penyiaran publik serta kebutuhan belanja modal. Selain itu juga perlu mendorong LPP TVRI dalam merumuskan strategi khusus guna meningkatkan kualitas, keterjangkauan dan ketersediaan penyiaran publik.



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN
DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

WWW.PA3KN.DPR.GO.ID
TELP. 021-5715635 FAX. 021-5715635
INSTAGRAM: @PA3KN.BKDPRRI
YOUTUBE: PA3KN BK DPR RI